

**PROSES PENDATAAN DAN DISTRIBUSI BERAS
MISKIN DI KECAMATAN BINJAI SELATAN
KOTA BINJAI**

SKRIPSI

OLEH

SAPRIENI

NPM : 10 851 0066

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2014**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **PROSES PENDATAAN DAN DISTRIBUSI BERAS MISKIN DI KECAMATAN BINJAI SELATAN KOTA BINJAI**

Nama Mahasiswa : **SAPRIENI**

No. Stambuk : **10 851 0066**

Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

(Drs. H. M. H. THAMRIN NST, M.Si)

(Drs. MHD. ASWIN Hsb, M.AP)



(DR. ABDUL KADIR, M.Si)

ABSTRAK

PROSES PENDATAAN DAN DISTRIBUSI BERAS MISKIN DI KECAMATAN BINJAI SELATAN KOTA BINJAI

OLEH
SAPRIENI

NPM : 10 851 0066

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

Program Raskin adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat berupa bantuan beras bersubsidi kepada rumah tangga berpendapatan rendah (rumah tangga miskin dan rentan miskin).

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui : 1) Bagaimana mekanisme pendataan keluarga penerima Raskin di Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai. 2) Kendala-kendala apa yang dialami dalam proses pendataan keluarga penerima Raskin di Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai. 3) Bagaimana upaya yang dilakukan Kecamatan dalam mengurangi berbagai permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan Program Raskin.

Hasil penelitian menunjukkan 1) Manfaat dari Program Raskin ini, dinilai masih kurang, sehingga belum dapat mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin. 2) Sebagian besar RTS program Raskin merasa bahwa pembagian beras kepada warga miskin mempunyai manfaat minimal kebutuhan dalam satu minggu. 3) Ketidaktepatan sasaran didukung dengan data BPS yang kurang valid, karena pendataannya tidak berkoordinasi dengan RT dan RW setempat (bersifat tertutup). 4) Implementor cukup paham tugasnya masing-masing, sosialisasi juga berjalan dengan baik sesuai dengan yang diinginkan. Akan tetapi belum tepat sasaran karena warga yang tergolong mampu mendapatkan Raskin.

Kata Kunci : Proses Pendataan dan Distribusi RASKIN



DAFTAR ISI

	Halaman
ABTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Pembatasan Masalah	6
1.4 Perumusan Masalah	6
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Uraian Teori	8
2.1.1 Program RASKIN	8
2.1.2 Dasar Hukum	11
2.1.3 Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi Kebijakan Program RASKIN	12
2.1.4 Kemiskinan	14
2.1.5 Penyebab Kemiskinan	17
2.1.6 Indikator Kemiskinan	21
2.2 Kerangka Pemikiran	22
2.3 Hipotesis	23
BAB III METODELOGI PENELITIAN	
3.1 Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian	25
3.2 Populasi dan Sampel	26
3.3 Variabel dan Definisi Operasional	27
3.4 Teknik Pengumpulan Data	27
3.5 Analisis Data	28

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1.1	Profil Kota Binjai	30
4.1.2	Profil Kantor Camat Binjai Selatan.....	32
4.1.3	Visi dan Misi	33
4.1.4	Struktur Organisasi	35

BAB V ANALISIS DAN EVALUASI

5.1	Koordinasi Raskin Kecamatan	39
5.1.1	Pendataan Keluarga	39
5.1.2	Teknik Pendataan Keluarga Miskin	42
5.1.3	Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM)	43
5.2	Pelaksana Distribusi Raskin	44
5.2.1	Mekanisme Distribusi dan Administrasi	45
5.2.2	Implementasi Program Raskin	50
5.3	Isi Kebijakan Program Raskin	50
5.4	Pemantauan dan Evaluasi	57
5.5	Indikator Kinerja Program	58
5.6	Sosialisasi	59
5.7	Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program RASKIN	61

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1	Kesimpulan.....	64
6.2	Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan masalah sosial laten yang senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya di negara-negara berkembang. Kemiskinan senantiasa menarik perhatian berbagai kalangan, baik para akademisi maupun para praktisi. Berbagai teori, konsep dan pendekatan pun terus menerus dikembangkan untuk mengatasi masalah kemiskinan ini. Dalam konteks masyarakat Indonesia, masalah kemiskinan juga merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji secara terus menerus. Ini bukan saja karena masalah kemiskinan telah ada sejak lama, melainkan pula karena masalah ini masih hadir di tengah-tengah kita dan bahkan kini gejala semakin meningkat sejalan dengan krisis multidimensional yang masih dihadapi oleh bangsa Indonesia.

Krisis ekonomi yang diawali dari gejolak krisis moneter yang melanda Asia Tenggara, telah menjadi krisis yang bersifat multi dimensi. Pemulihan ekonomi yang terus dilakukan pemerintah hingga saat ini merupakan upaya pemerintah untuk meredam dampak dari krisis tersebut. Pemulihan ini dilakukan di semua sektor melalui masing-masing kebijakan untuk tiap-tiap sektor dengan menilik masalah-masalah yang sedang menjadi isu sentral saat ini. Salah satu isu sentral permasalahan di Indonesia hingga saat ini ialah masalah kemiskinan.

Krisis telah membuat penderitaan penduduk perkotaan lebih parah ketimbang penduduk pedesaan. Menurut Thorbecke setidaknya ada dua

penjelasan atas hal ini : Pertama, krisis cenderung memberi pengaruh lebih buruk pada beberapa sektor ekonomi utama di perkotaan, seperti perdagangan, perbankan dan konstruksi. Sektor-sektor ini membawa dampak negatif dan memperparah pengangguran di perkotaan. Di sektor perdagangan banyak investor bersama dengan industri manufakturnya yang berada di wilayah perkotaan merasakan akses dari krisis tersebut.

Inflasi yang melanda hampir menyeluruh untuk Asia ini menyebabkan harga bahan baku untuk industri pengolahan khususnya yang berasal dari luar negeri (impor) mengalami kenaikan tajam. Di sisi lain, permintaan produk turun seiring dengan merosotnya daya beli masyarakat yang disebabkan oleh krisis moneter yang kian menenggelamkan nilai rupiah. Sehingga banyak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap buruh dengan tujuan mengurangi beban biaya produksi tinggi. Bahkan tidak sedikit dari industri-industri tersebut yang gulung tikar.

Strategi pembangunan Indonesia terlalu berkiblat kepada teori Barat, khususnya teori Lewis dan Ranis-Frei, yang aplikasinya untuk Indonesia dikritisi secara tajam. Para pakar tersebut berpendapat bahwa untuk memajukan perekonomian maka perlu dilakukan pembangunan pada sektor industri, di mana tenaga kerja yang berlimpah dapat diserap di sektor industri tersebut (Purbayu Budi Santosa, 2009). Pembangunan sektor industri yang dilakukan di Indonesia adalah pengembangan industri-industri yang berspektrum luas (*broad based industry*). Yaitu strategi yang lebih menekankan pengembangan industri-industri berbasis impor (*footlose industry*). Industri itu bersumber dari relokasi industri dan perluasan pasar industri negara lain (seperti industri elektronik, tekstil,

otomotif dan lain-lain) dengan industri berteknologi canggih berbasis impor (*hi-tech industry*), seperti industri pesawat terbang, persenjataan, kapal, dan industri lainnya.

Artinya, industri yang dikembangkan di Indonesia adalah industri padat modal dan berbahan baku kebanyakan dari luar negeri. Karena strategi pembangunan macam begitu yang diambil, berakibat kepada sektor pertanian dan pedesaan, dan menjamurlah sektor informal. Kredit dari perbankan yang dialokasikan untuk sektor industri demikian besar, sementara untuk sektor pertanian sangatlah minim. Belum lagi, ini perlu dicatat secara khusus, alokasi kredit untuk sektor industri sarat dengan budaya KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme).

Akibatnya banyak usaha yang mengalami kemacetan ketika krisis ekonomi dan keuangan (Purbayu Budi Santosa, 2009). Angka pengangguran yang meningkat akibat adanya PHK tersebut terus ditambah dengan peningkatan laju urbanisasi. Dengan semakin tingginya angka pengangguran maka akan lebih banyak lagi keluarga yang mempunyai daya beli kebutuhan yang rendah. Ditambah dengan adanya inflasi barang-barang konsumsi yang semakin membuat pemenuhan kebutuhan masyarakat menjadi sulit untuk dicapai. Dengan kata lain, adanya penurunan kesejahteraan masyarakat perkotaan tersebut merupakan gejala berantai yang saling berkaitan antar sektor.

Kedua, pertambahan harga bahan makanan kurang berpengaruh terhadap penduduk pedesaan, karena mereka masih dapat memenuhi kebutuhan dasarnya melalui sistem produksi subsistem yang dihasilkan dan dikonsumsi sendiri. Hal

ini tidak terjadi pada masyarakat perkotaan dimana sistem produksi subsistem,

khususnya yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan makanan, tidak terlalu dominan pada masyarakat perkotaan (Suharto,2002). Ironisnya, pada saat ini hal demikian sudah tidak berlaku, karena kenyataannya para petani telah menjadi *net-consumer* dan bukan menjadi *net-producer*.

Penyebab utamanya adalah adanya kelangkaan pasokan beras domestik yang dibarengi dengan peningkatan konsumsi kebutuhan pokok pangan, khususnya beras. Kelangkaan pasokan beras domestik ini juga berakibat pada peningkatan harga beras. Jika harga beras naik, tidak ada jalan lain memang, kecuali menambah pasokan supaya harga diturunkan. Penambahan pasokan tersebut dilakukan pemerintah dengan kebijakan impor beras. Namun, bila kebijakan impor beras tersebut dilakukan secara tidak cermat dikhawatirkan bisa merugikan produsen dalam negeri yang tidak lain adalah petani (Muhammad, 2007).

Program RASKIN yang sebelum tahun 2002 bernama Operasi Pasar Khusus (OPK). Sebagai salah satu program penanggulangan kemiskinan, dalam rangka perlindungan sosial melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin dan merupakan pendukung program lainnya seperti perbaikan gizi, peningkatan kesehatan, pendidikan dan peningkatan produktivitas. Program RASKIN merupakan subsidi pangan sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin melalui pendistribusian beras yang diharapkan mampu menjangkau keluarga miskin dimana masing-masing keluarga akan menerima beras minimal 10 Kg/KK per bulan netto dengan harga netto Rp. 1.000 per Kg di titik distribusi.

Pada tahun 2002, nama Program Operasi Pasar Khusus (OPK) diubah menjadi RASKIN (Beras Untuk Keluarga Miskin) dengan tujuan agar lebih dapat

tepat sasaran. Program ini terus berjalan sampai dengan saat ini dengan mengikuti kemampuan subsidi yang dapat diberikan pemerintah kepada keluarga miskin dan perkembangan data keluarga miskin yang terus dilakukan penyempurnaan. Berdasar uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengambil judul: **“Proses Pendataan dan Distribusi Beras Miskin di Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Menurut Sukardi (2009) “Permasalahan dalam penelitian adalah kesulitan yang dirasakan oleh orang awam maupun para peneliti; permasalahan dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang menghalangi tercapainya tujuan”. Sedangkan Setyosari (2010) mengemukakan Secara umum, suatu masalah didefinisikan sebagai “Keadaan atau kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Masalah sebagai gap antara kebutuhan yang diinginkan dan kebutuhan yang ada”.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, adapun identifikasi masalah yang ditarik yaitu sebagai berikut :

- 1) Distribusi Program Raskin di Kecamatan Binjai Selatan belum tepat sasaran, belum tepat jumlah dan belum tepat waktu.
- 2) Data RTS dari BPS dengan data penerima Raskin tidak sama.
- 3) Akibat dibagi rata maka jumlah beras yang diterima RTM relatif sedikit, sehingga kurang bermanfaat bagi penerima.
- 4) Upaya pengelolaan Program Raskin ke depan agar lebih baik.



1.3 Pembatasan Masalah

Menurut Arikunto (2002), mengatakan bahwa “Masalah itu mesti merupakan bagian dari “kebutuhan” seseorang untuk dipecahkan. Penyebab orang ingin mengadakan penelitian adalah karena ia ingin mendapatkan jawaban dari masalah yang dihadapi”.

Sementara itu Sedarmayanti dan Hidayat (2001), mengatakan bahwa “Masalah adalah peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sedangkan apa yang disebut dengan permasalahan penelitian adalah suatu pembatasan fokus perhatian pada ruang lingkungannya sampai menimbulkan pertanyaan dalam diri orang-orang yang mencari permasalahan”.

Untuk mencegah mengembangkannya permasalahan maka penulis membatasi masalah untuk lebih terperinci dan jelas sehingga pemecahannya terarah dan berhasil sehingga masalah yang tidak berguna dapat dihindari dan tidak terjadi penafsiran yang salah. Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah sebatas pada proses pendataan dan pendistribusian beras miskin di Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai selama tahun 2012.

1.4 Perumusan Masalah

Dari identifikasi masalah tersebut, maka dapat dirumuskan masalah tentang Program Raskin, sebagai berikut :

- a. Bagaimana mekanisme pendataan keluarga penerima Raskin di Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai ?
- b. Kendala-kendala apa yang dialami dalam proses pendataan keluarga penerima Raskin di Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai ?

- c. Bagaimana upaya yang dilakukan Kecamatan dalam mengurangi berbagai permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan Program Raskin ?

1.5 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah proses pendataan dan pendistribusian beras miskin yang yang diterapkan Pemerintah Kota Binjai.
- b. Untuk mengetahui kendala apa sajakah yang dihadapi dalam pelaksanaan program pendistribusian beras miskin di Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai ?

Adapun kegunaan diadakan penelitian ini adalah :

- a. Bagi Pemerintah Kota Binjai, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi atas kinerja yang selama ini dilaksanakan dan menjadi bahan masukan dalam mengambil kebijakan yang terkait.
- b. Bagi penulis adalah sebagai wahana melatih, menguji dan mengembangkan pengalaman dan pola berfikir ilmiah untuk memperdalam dan mengembangkan pengetahuan akademik penulis dalam bidang studi pemerintahan khususnya pendataan warga yang berhak mendapatkan beras miskin di tingkat Kecamatan.
- c. Sebagai bahan referensi bagi para akademisi lainnya dalam penelitian selanjutnya yang berhubungan judul penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teori

2.1.1 Program RASKIN

Nama RASKIN (Beras untuk Keluarga Miskin)- yang mulai diterapkan tahun 2002 (lima tahun setelah Operasi Pasar Khusus / OPK 1998) adalah metamorfosis yang bertujuan untuk lebih menjelaskan arti program sehingga diharapkan dapat mempermudah pelaksanaan di lapangan. RASKIN merupakan salah satu program andalan pemerintah yang sudah lama hingga saat ini masih digulirkan.

Program Raskin adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat berupa bantuan beras bersubsidi kepada rumah tangga berpendapatan rendah (rumah tangga miskin dan rentan miskin). Program Raskin adalah program nasional lintas sektoral baik vertikal (Pemerintah Pusat sampai dengan Pemerintah Daerah) maupun horizontal (lintas Kementerian/Lembaga), sehingga semua pihak yang terkait bertanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan dan pencapaian tujuan Program Raskin.

Adapun tujuan program RASKIN, sasaran program RASKIN, kriteria program RASKIN, bentuk Program RASKIN, dan indikator program RASKIN adalah sebagai berikut :

1. Tujuan

Adapun tujuan dari diadakannya program RASKIN ini adalah untuk :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

- a) Meningkatkan ketahanan pangan di tingkat keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat pada tingkat harga bersubsidi dengan jumlah yang telah ditentukan.
- b) Memberikan bantuan pangan keluarga miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan beras.
- c) Meningkatkan/membuka akses pangan keluarga miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan beras.

2. Sasaran

Sasaran dari program RASKIN ini ialah Rumah tangga miskin (RTM) di desa/ kelurahan yang berhak menerima beras RASKIN, sebagai hasil seleksi Musyawarah Desa/kelurahan yang terdaftar dalam daftar penerimaan manfaat (DPM), ditetapkan oleh Kepala Desa/ Kelurahan dan disahkan oleh Camat.

3. Kriteria

RASKIN hanya diberikan kepada Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat RASKIN hasil musyawarah desa yang terdaftar dalam Daftar penerima manfaat (DPM-1) dan diberi identitas (kartu RASKIN dan bentuk lain).

4. Prinsip-prinsip RASKIN

Prinsip-prinsip pengelolaan RASKIN meliputi :

- a) Keberpihakan kepada Rumah Tangga Miskin
- b) Transparansi
- c) Partisipatif
- d) Akuntabilitas

5. Bentuk Program

Pembagian beras kepada kepala Rumah Tangga Miskin hasil Musyawarah Desa/ kelurahan yang terdaftar dalam daftar penerimaan Manfaat (DPM-1).

6. Indikator Keberhasilan

- a. *Tepat Sasaran Penerima Manfaat*; RASKIN hanya diberikan kepada Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat RASKIN hasil Musyawarah desa yang terdaftar dalam Daftar Dalam Penerima Manfaat (DPM-1) dan diberi identitas (kartu RASKIN atau bentuk lain).

Rumus :

$$S = \frac{S_a}{SS} \times 100\%$$

Dimana :

S = indeks kinerja ketepatan sasaran (%)

S_a = jumlah rumah tangga yang aktual menerima.

SS = jumlah rumah tangga yang seharusnya menerima (terdaftar dalam DPM-1).

- b. *Tepat Jumlah*; jumlah beras RASKIN yang merupakan hak Penerima Manfaat adalah sebanyak 10 sampai dengan 15 kg/RTM/bulan sesuai dengan hasil musyawarah.

Rumus :

$$J = \frac{J_a}{J_s} \times 100\%$$

Dimana :

J = indeks kinerja ketepatan jumlah.

J_a = jumlah beras aktual yang diterima responden (Kg/RTM/Bulan).

J_s = jumlah beras yang seharusnya diterima responden.

- c. *Tepat Harga*; Harga beras RASKIN adalah sebesar Rp 1.000/kg netto di titik distribusi.

Rumus :

$$H = \frac{h_a}{H_s} \times 100\%$$

Dimana :

H = indeks kinerja ketepatan jumlah (%).

h_a = harga beras yang aktual dibayar responden (Rp 1000/kg).

h_s = harga beras yang seharusnya dibayar responden (Rp/kg).

- d. *Tepat Waktu*; Waktu pelaksanaan distribusi distribusi beras kepada Rumah Tangga Miskin penerima manfaat RASKIN sesuai dengan Rencana Distribusi.
- e. *Tepat Administrasi*; terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar dan tepat waktu.

2.1.2 Dasar Hukum

Peraturan Perundangan yang menjadi landasan pelaksanaan Program Raskin adalah:

- 1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1996, tentang Pangan.
- 2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003, tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- 3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.
- 4) Undang-Undang No. 41 Tahun 2008, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009.

- 5) Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002, tentang Ketahanan Pangan.
- 6) Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2003, tentang Pendirian Perusahaan Umum BULOG.
- 7) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 8) Peraturan Presiden RI No. 7 Tahun 2005, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009.
- 9) Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2005, tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
- 10) Peraturan Presiden RI No. 38 Tahun 2008, tentang Rencana Kerja Pemerintah 2009.
- 11) Inpres Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan Nasional.
- 12) Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang "Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.1.3 Faktor-faktor Penentu Keberhasilan Implementasi Kebijakan Program RASKIN

1. Komunikasi

- Interaksi yang insentif antara organisasi pelaksana kebijakan RASKIN dengan kelompok sasaran.
- Pesan yang disampaikan komunikator mengandung kejelasan.
- Sosialisasi rutin kepada masyarakat tentang kebijakan RASKIN baik berupa penanganan pengaduan masyarakat.

2. Sumber Daya

- Sumber Daya Manusia aparat yang terlibat dalam melaksanakan kebijakan RASKIN cukup baik dan sesuai dengan jabatan serta keahlian.
- Implementator dan aparat pelaksana kebijakan RASKIN sudah memiliki tenaga terampil dan memadai.
- Kewenangan yang terjadi antara aparat pelaksana kebijakan RASKIN sudah jelas dan sesuai dengan jabatan serta keahlian.

3. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik (EKOSOSPOL)

- Kondisi aparat pelaksana kebijakan RASKIN dengan masyarakat sudah kondusif.
- Peran politik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mendukung kebijakan RASKIN

4. Disposisi / Sikap

- Persepsi / pendapat aparat pelaksana kebijakan RASKIN dan masyarakat yang baik terhadap kebijakan RASKIN.
- Implementator dan aparat pelaksana kebijakan RASKIN diperlukan komitmen, kejujuran yang tinggi serta tingkat kepatuhan yang tinggi dan sifat demokratis.
- Masyarakat diperlukan memiliki komitmen dan kejujuran serta kepatuhan terhadap aturan dan prosedur kebijakan.

5. Karakteristik dan Kapabilitas Instansi dan Aparat Pelaksana Kebijakan RASKIN

- Dukungan berupa dana untuk pelaksanaan kebijakan RASKIN serta *Political Area* dan situasi yang kondusif.

- Pola-pola hubungan atau koordinasi antara aparat pelaksana kebijakan di tingkat Kota dengan aparat pelaksana distribusi di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

2.1.4 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan gambaran kehidupan di berbagai Negara berkembang, mencakup lebih dari satu miliar penduduk dunia, terutama di daerah pedesaan (masyarakat petani). Kemiskinan merupakan permasalahan yang diakibatkan oleh kondisi nasional suatu negara dan situasi global. Globalisasi ekonomi dan bertambahnya ketergantungan antar negara, tidak hanya merupakan tantangan dan kesempatan bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu negara, tetapi juga mengandung suatu resiko dan ketidakpastian masa depan perekonomian dunia. Secara ekonomi kemiskinan dikaitkan dengan masalah pendapatan. Karena pengertian ini tidak mampu menjelaskan masalah kemiskinan secara tuntas maka kemiskinan didefinisikan secara plural.

Sebagai suatu proses kemiskinan mencerminkan kegagalan suatu sistem masyarakat dalam mengalokasikan sumber daya dan dana secara adil kepada anggota masyarakat. Chambers menggambarkan kemiskinan, terutama di pedesaan mempunyai lima karakteristik yang saling terkait : kemiskinan material, kelemahan fisik, keterkucilan dan keterpencilan, kerentanan dan ketidakberdayaan. Kerentanan menurut Chambers (1983) dapat dilihat dari ketidakmampuan keluarga miskin untuk menyediakan sesuatu guna menghadapi situasi darurat seperti datangnya bencana alam, kegagalan panen atau penyakit yang tiba-tiba menimpa keluarga miskin itu.

Kerentanan dapat juga dikatakan merupakan kondisi di mana suatu keluarga miskin tidak memiliki kesiapan baik mental maupun material dalam menghadapi situasi sulit yang dialaminya. Kerentanan ini sering menimbulkan kondisi memprihatinkan yang menyebabkan keluarga miskin harus menjual harta benda dan aset produksinya sehingga mereka makin rentan dan tidak berdaya. Sedangkan ketidakberdayaan keluarga miskin salah satunya tercermin dalam kasus dimana elit desa dengan seenaknya memfungsikan diri sebagai oknum yang menjaring bantuan yang sebenarnya diperuntukan untuk orang miskin contohnya seperti kasus bantuan langsung tunai (BLT).

Sedangkan menurut Schiller menjelaskan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas (Sutrisno, 2001), dan dengan nada yang sama Salim mendefinisikan kemiskinan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok (Andre Bayu Ala, 1981).

Pengertian kemiskinan juga dapat dibedakan menjadi tiga pengertian :

1. Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang timbul karena pendapatan seseorang berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti sandang, pangan dan papan.
2. Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya.
3. Kemiskinan kultural adalah suatu kemiskinan yang berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha

memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.

Kemiskinan telah berdampak pada jatuhnya kualitas hidup manusia secara total ditandai dengan sempitnya nalar, egoisme atau ingin menang sendiri. Setiap masalah kemasyarakatan cenderung sering diselesaikan dengan adu otot, kekerasan dan mengerahkan massa (Asy'arie, 2001). Kemiskinan juga dapat diartikan sebagai akibat dari ketiadaan demokrasi, yang mencerminkan hubungan kekuasaan yang menghilangkan kemampuan warga suatu negara untuk memutuskan masalah yang menjadi perhatian mereka sendiri, sehingga mayoritas penduduk kurang memperoleh alat-alat produksi (lahan dan teknologi) dan sumberdaya (pendidikan, kredit, dan akses pasar). Selain itu kurangnya mekanisme yang memadai untuk akumulasi dan distribusi (Basri, 2002).

Menurut Adelman, di daerah perkotaan mayoritas kaum miskin adalah pekerja-pekerja tidak terlatih di sektor jasa-jasa. Para pekerja di sector manufaktur (industri pengolahan), apakah mereka itu terlatih atau tidak, merupakan bagian 20-40 persen penduduk yang paling kaya. Jadi tenaga kerja tidak terlatih merupakan milik utama kaum miskin dan yang menentukan arah kemiskinan adalah adanya permintaan akan produktivitas dari tenaga kerja mereka itu.

Menurut BPS pengertian kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang hanya dapat memenuhi kebutuhan makanannya kurang dari 2.100 kalori per kapita per hari. Sedangkan kemiskinan menurut definisi BKKBN adalah keluarga Pra Sejahtera yaitu keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic needs*) secara minimal, seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan.

2.1.5 Penyebab Kemiskinan

Ada dua kondisi yang menyebabkan kemiskinan bisa terjadi, yakni :

1. Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang terjadi antara lain akibat sumber daya alam yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah dan bencana alam.
2. Kemiskinan buatan adalah kemiskinan yang terjadi dikarenakan lembaga-lembaga yang ada di masyarakat membuat sebagian anggota masyarakat tidak mampu menguasai sarana ekonomi dan berbagai fasilitas lain yang tersedia, hingga mereka tetap miskin.

Perlu disadari bahwa lembaga-lembaga dalam pasaran faktor dan produk merupakan penentu-penentu penting mengenai bagaimana pembangunan mempengaruhi kaum miskin. Perubahan struktural yang bertalian dengan pembangunan menimbulkan proses-proses yang sekaligus meningkatkan penyerapan sebagian tenaga kerja dan faktor lain, serta menimbulkan relokasi-relokasi geografis dan sektoral bagi digunakannya tenaga kerja dan faktor lain. Bagaimana proses-proses penyerapan, penggantian dan retribusi angkatan kerja “hasilnya bersihnya” berpengaruh pada kaum miskin, tergantung pada struktur kelembagaan dari pasaran-pasaran faktor dan produk. Itulah sebabnya para pakar ekonomi sering mengkritik kebijakan pembangunan melulu terfokus pada pertumbuhan daripada pemerataan.

Kebijakan yang terfokus pada pertumbuhan tersebut akhirnya mengabaikan pemerataan pendapatan yang menciptakan ketimpangan antara penduduk miskin dan penduduk kaya. Seperti dalam paradok kemiskinan, bahwa “kemiskinan meningkat tajam ditengah masyarakat yang kaya”. Kemiskinan

meningkat secara tajam tepat ditengah masyarakat yang kaya. Ajaran teori lama bahwa pemerataan akan dengan sendirinya makin baik setelah mencapai tingkat pembangunan tertentu (*trickle down effect*), dan untuk mengejar pertumbuhan cepat, pemerataan harus dikorbankan dahulu sudah usang dikalangan perencana ekonomi pembangunan kontemporer.

Banyak yang mengkhawatirkan efek *trickle down* karena berbagai sebab, tidak bisa otomatis terealisasi dan yang terjadi justru sebaliknya, *trickle up*, karena dalam kondisi surplus tenaga kerja, buruh gaji sangat rendah, dan usaha kecil selalu kalah dalam tawar menawar. Di pihak lain, akibat majunya komunikasi massa global, adanya kemiskinan dan ketidakmerataan ditengah kemajuan ekonomi, akan membawa dampak sosial politik yang justru sangat berbahaya bagi kelangsungan pembangunan. *Demonstration effect* dari pembangunan ekonomi negara-negara lain besar pengaruhnya bagi pembangunan suatu negara. Karena itu isu kemiskinan dan ketimpangan harus ditangani sejak awal.

Apa yang terjadi pada kemiskinan dalam perjalanan waktu ditentukan oleh tingkat pertumbuhan pendapatan total dan oleh perubahan-perubahan pada bagian yang diperoleh kaum miskin dari pendapatan itu. Jika bagian yang diperoleh kaum miskin turun lebih cepat dari peningkatan keseluruhan pendapatan itu, kaum miskin rugi oleh pertumbuhan itu, selain itu mereka untung. Maka bagaimana pendapatan kaum miskin itu berubah dengan pembangunan ekonomi, amat penting untuk memahami masalah kemiskinan dan pemberantasannya. Tahap-tahap awal dari proses pembangunan itu, selama perekonomian yang kebanyakan bersifat agraris muali dengan industrialisasi, hampir selalu ditandai dengan

kenaikan-kenaikan yang cukup besar dalam ketidaksamaan dalam pembagian pendapatan.

Bagian-bagian yang diterima oleh golongan termiskin merupakan seperlima, dua perlima dan tiga perlima dari jumlah penduduk semuanya turun dengan tajam karena diciptakannya suatu pulau kecil yang berpenghasilan tinggi ditengah lautan besar orang-orang yang berpenghasilan rendah. Tahap-tahap selanjutnya dari proses pembangunan itu ditandai dengan naiknya bagian pendapatan yang diperoleh mereka yang terlibat dalam sektor ekonomi modern berpenghasilan tinggi, suatu pelebaran kesenjangan pendapatan antara sektor berpenghasilan tinggi dan sektor berpenghasilan rendah dalam perekonomian itu dan peningkatan dalam ketidaksamaan, baik dalam sektor yang berpenghasilan tinggi maupun dalam sektor yang berpenghasilan yang rendah.

Perpindahan penduduk dari sektor yang berpenghasilan rendah ke sektor berpenghasilan yang tinggi merupakan yang mengurangi ketidaksamaan itu. Dihilak lain, meningkatnya rata-rata diferensial pendapatan diantara sektor-sektor merupakan faktor-faktor yang menciptakan ketidaksamaan yang lebih besar. Secara keseluruhan, kecenderungan adalah meningkatnya ketidaksamaan, paling tidak untuk sementara. Berbagai simulasi telah mengesankan bahwa meningkatnya ketidaksamaan ini akan cenderung berlanjut sampai sedikitnya separuh penduduk berada di sektor berpenghasilan tinggi. Tidak ada kecenderungan dengan sendirinya untuk membaiknya pembagian pendapatan itu, selagi negara-negara memasuki tahap terakhir dari peralihan mereka ke status sebagai negara industri.

Naik tidaknya ketidaksamaan itu tergantung pada kebijakan-kebijakan yang ditakuti negaranegara itu. Khususnya, hal itu tergantung pada sejauh mana kebijakan-kebijakan yang diikuti itu mempersempit kesenjangan antara sektor-sektor itu, sejauh mana mereka mengurangi penyebaran pendapatan dalam sektor modern yang relatif cepat penyerapan kedalam sektor modern.

Ada tiga penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi yaitu :

1. Secara mikro kemiskinan muncul karena pendapatan yang timpang.

Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitas rendah.

2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia.

Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendah kualitas sumber daya ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau karena keturunan.

3. Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

Penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*). Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan dan seterusnya.

2.1.6 Indikator Kemiskinan

Suatu objek dalam penelitian mempunyai ciri atau sifat. Jika kita mengukur suatu objek dalam penelitian, yang diukur sebenarnya bukan objek tersebut, bukan pula sifatnya, tetapi yang diukur adalah indikasi dari ciri atau sifat objek tersebut. Maka dalam kajian penelitian dengan objek kemiskinan, akan ditentukan oleh indikator dari ciri atau sifat kemiskinan. Indikator tidak Kekurangan Modal Investasi Rendah Tabungan Rendah Produktifitas Rendah Pendapatan Rendah Ketidaksempunaan Pasar, Keterbelakangan dan ketertinggalan lain dari suatu istilah yang sering digunakan, yang berarti “sesuatu yang menunjukkan pada sesuatu yang lain”.

BPS memberikan 15 kriteria yang menjadikan sebagai indikator keluarga miskin sebagai berikut :

1. Luas lantai bangunan tempat kurang dari 8 m² per orang.
2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/rumbia/kayu.
3. Berkualitas rendah/ tembok tanpa diplester.
4. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/ tembok tanpa diplester.
5. Tidak memiliki fasilitas buang air besar / bersama-sama dengan rumah tangga lain.
6. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
7. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/sungai.
8. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
9. Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam satu kali dalam seminggu.

10. Hanya membeli satu stel pakaian dalam setahun.
11. Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari.
12. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas atau poliklinik
13. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0.5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerja lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,00 per bulan.
14. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga adalah tidak sekolah, tidak tamat SD dan hanya SD.
15. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual, seperti : sepeda motor, (kredit atau non kredit), emas, ternak, atau barang modal lainnya. (www.depsos.go.id).

2.2 Kerangka Pemikiran

Seiring dengan perubahan dalam paradigma pembangunan ekonomi yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi saja namun juga pada penanggulangan masalah kemiskinan, maka sudah sepantasnya apabila pemerintah dituntut untuk dapat mengentaskan masalah kemiskinan tersebut dengan pengadaan paket-paket kebijakan yang memberikan perlindungan pada penduduk miskin melalui program-program pengentasan kemiskinan yang diharapkan dapat mengurangi jumlah penduduk miskin yang secara pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk yang merata.

Pemerintah telah menggulirkan kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui program-program anti kemiskinan. Program-program anti kemiskinan tersebut diantaranya adalah Program RASKIN. Program RASKIN tersebut

diharapkan dapat membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasar pangan melalui penyediaan beras dengan harga jual yang rendah yang dimaksudkan agar dapat dijangkau oleh masyarakat lapisan bawah, terutama masyarakat miskin.

Adapun cara tahapan yang dilalui dalam pelaksanaan program Raskin ini antara lain yaitu, tahap pendataan keluarga RTS (Rumah Tangga Sasaran) yang berhak menerima Raskin, tahap pendistribusian Raskin, mekanisme pendistribusian, mekanisme pembayaran, dan evaluasi kegiatan.

Ketertarikan penulis pada masalah kemiskinan telah menjadikan program RASKIN sebagai obyek penelitian dalam skripsi ini. Selama ini program raskin mendapat banyak sorotan yang kurang baik oleh publik akibat pemberitaan yang berkembang mengenai kurang baiknya pengelolaan program raskin baik secara teknis maupun non teknis. Berdasarkan pendapat dan penjelasan di atas, maka kerangka konseptual yang akan dipaparkan yaitu berfokus pada proses pendataan dan pendistribusian beras miskin di Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai.

2.3 Hipotesis

Teguh (2005) mengemukakan bahwa “Hipotesis merupakan pendapat, jawaban atau dugaan yang sifatnya sementara dari suatu persoalan yang diajukan dan kebenarannya masih perlu dibuktikan lebih lanjut”.

Sedangkan Arikunto (2004) mengemukakan bahwa “Hipotesis adalah sebagai anggapan sementara terhadap suatu soal yang dimaksudkan dari kemungkinan adanya data atau jawaban untuk menegakkan hipotesis tersebut untuk mencapai jawaban sebenarnya”.



Dari beberapa pengertian hipotesis tersebut di atas, adapun hipotesis yang dapat ditarik dalam penelitian ini yaitu “Proses penataan dan pendistribusian beras miskin di Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai telah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis, Sifat, Lokasi, dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007).

3.1.2 Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat diskriptif-analitis. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, 'analitis' (analisis) artinya adalah bersifat analisis, yang artinya proses pemecahan masalah yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya (Yashin,1997). Sedangkan analisa diskriptif dilakukan terutama ditujukan untuk pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang (Winarno,1978), terutama masalah-masalah implementasi program beras miskin (Raskin) di Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai

Penelitian diskriptif adalah suatu penelitian yang bersifat pemaparan dalam rangka menggambarkan selengkap mungkin suatu keadaan yang berlaku ditempat tertentu, atau suatu gejala yang ada, atau suatu peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat dalam konteks penelitian (Muhammad, 2007 dan Soekanto, 1997). Terkait dengan tema penelitian, maka penelitian ini berupaya melakukan

kajian pada suatu usaha pemerian, analisis dan penafsiran guna menggambarkan dan mendiskripsikan implementasi program Raskin di Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai. Pemberian, analisis dan penafsiran terhadap fenomena yang berkait dalam implementasi program Raskin di Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai.

3.1.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Binjai Selatan yang beralamat di Jl. Jl. Gunung Bendahara No. 58 Binjai, Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara.

3.1.4 Waktu Penelitian

Waktu penelitian di mulai dari bulan Desember tahun 2013 sampai dengan Bulan Maret 2014.

3.2 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2004) “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/ subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.

Sedangkan menurut Arikunto (2002) “Populasi adalah sejumlah keseluruhan subjek penelitian yang menjadi sumber data”.

Adapun populasi untuk penelitian ini adalah proses pendataan dan distribusi beras miskin yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Binjai.

Menurut Arikunto (2002) “Sampel adalah sebagian dari populasi yang dipandang dapat mewakili populasi untuk dijadikan sebagai sumber data atau informasi”.

Adapun sampel untuk penelitian ini adalah proses pendataan dan distribusi beras miskin yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Binjai tahun anggaran 2012.

3.3 Variabel dan Definisi Operasional

Variabel – variabel yang akan dioperasikan dalam penelitian ini adalah variabel yang terkandung hipotesis yang telah dirumuskan. Untuk memberikan jawaban yang jelas terhadap penelitian yang dilaksanakan, maka penulis menarik variabel dalam penelitian ini yaitu analisis proses pendataan dan proses pendistribusian beras miskin yang diterapkan di Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai. Adapun variabel tersebut akan dipaparkan dalam bentuk definisi operasional sebagai berikut :

1. Proses Pendataan, dengan indikatornya yaitu :
 - Keluarga yang berhak mendapat Raskin
2. Proses Pendistribusian, dengan indikatornya yaitu :
 - Proses pendistribusian beras miskin kepada keluarga yang berhak memperolehnya.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang sistematis dan objektif untuk memperoleh atau mengumpulkan keterangan-keterangan yang bersifat lisan maupun tulisan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara sebagai berikut :

- 1) Pengamatan (observasi) yaitu suatu teknik pengumpulan data, dimana responden tidak mengetahui sedang dijadikan sumber data atau penelitian (responden pasif). Pengamatan terhadap rutinitas dilokasi penelitian , langsung terhadap objek yang diteliti.
- 2) Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang diperoleh yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Adapun data yang dipergunakan seperti jumlah keluarga penerima Raskin, jumlah besaran Raskin yang diterima per keluarga, dsb.
- 3) Studi kepustakaan (*Lybrary Research*). Dalam hal ini, penulis mempelajari buku-buku yang memuat teori yang berhubungan dengan permasalahan yang di teliti, yaitu melalui tulisan ilmiah, masalah yang ada hubungannya dengan peneletian ini dan dapat membantu memecahkan masalah yang di teliti dan hasilnya akan dijadikan sebagai bahan perbandingan terhadap informasi yang di dapatkan di lapangan.
- 4) Wawancara (*Interview*), yaitu kepada pada petugas kecamatan yang bertugas melakukan pendataan dan pendistribusian beras miskin, juga dilakukan wawancara kepada warga miskin penerima beras miskin.

3.5 Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang dapat menghasilkan data deskriptif, analisis ini dinyatakan secara tertulis dan lisan. Analisis digunakan untuk membatasi atau menyempitkan penemuan yang ada untuk menjadi data yang lebih berarti. Analisis dilakukan setelah melalui tahapan

pengumpulan data. Analisis data ini berproses secara induktif yaitu pengambilan kesimpulan setelah data terkumpul. Analisis data mencakup tiga tahapan, yaitu:

1. Pencatatan

Setelah memperoleh data dari proses pengumpulan data, selanjutnya data dianalisis, tahapan pertama adalah pencatatan data. Data yang telah berhasil dikumpulkan kemudian dicatat agar tidak hilang sehingga dapat memudahkan tahapan selanjutnya.

2. Pengklasifikasian

Setelah data dicatat, kemudian data yang telah terkumpul diklasifikasi/dikelompokkan, sehingga dapat diketahui data-data yang satu tipe atau satu jenis. Pengelompokan didasarkan pada jawaban/data yang telah diperoleh.

3. Verifikasi

Verifikasi merupakan tahap akhir dari analisis data yang merupakan tahapan penarikan kesimpulan. Data dari hasil verifikasi merupakan data yang kemudian akan digunakan dalam proses penelitian selanjutnya.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan dari hasil observasi langsung sermengeai Proses Pendataan dan Distribusi Beras Miskin di Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, adapun hal - hal yang dapat disimpulkan ialah sebagai berikut :

1. Dalam menentukan sasaran ditemui adanya kesalahan sasaran (*mistargeting*) meskipun dalam tingkat yang relatif rendah, sering tidak tepat karena mementingkan kelompok-kelompok tertentu (*subyektifitas*), pembagian jatah Raskin tidak sesuai dengan Kebijakan Program Raskin yaitu dengan membagi rata pada semua warga.
2. Manfaat dari Program Raskin ini, dinilai masih kurang, sehingga belum dapat mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin.
3. Sebagian besar RTS program Raskin merasa bahwa pembagian beras kepada warga miskin mempunyai manfaat minimal kebutuhan dalam satu minggu.
4. Ketidaktepatan sasaran didukung dengan data BPS yang kurang valid, karena pendataannya tidak berkoordinasi dengan RT dan RW setempat (bersifat tertutup).
5. Implementor cukup paham tugasnya masing-masing, sosialisasi juga berjalan dengan baik sesuai dengan yang diinginkan. Akan tetapi belum tepat sasaran karena warga yang tergolong mampu mendapatkan Raskin.

6.2 Saran

Adapun hal-hal yang dapat disarankan penulis yang mungkin dapat menjadi bahan masukan dan perhatian bagi manajemen/ *Stakeholder* dalam hal ini Pemerintah Kota Binjai secara umum dan Kecamatan Binjai Selatan khususnya antara lain yaitu :

1. Diperlukan sosialisasi di tingkat desa/kelurahan dan masyarakat untuk memberi pemahaman tentang tujuan, filosofi bantuan, perubahan karakteristik kesejahteraan masyarakat, tingkat kemiskinan, serta perubahan pagu dan penetapan RTS (Rumah Tangga Sasaran).
2. Diperlukan pemantauan terhadap proses dan hasil pemutakhiran RTS dari tingkat desa/kelurahan dan penyaluran Raskin.
3. Perlu dibangun sistem keluhan dan penanganannya secara berjenjang dengan melibatkan Pemda.
4. Pelibatan TKPKD (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dalam meningkatkan kinerja program dan uraian tugasnya secara jelas.
5. Penyediaan payung hukum bagi pemda untuk mengalokasikan APBD, khususnya untuk biaya transport dan pengelolaan Raskin di daerah. Hal ini dapat disiasati pula melalui penyediaan biaya *safeguarding* oleh Pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Asy'arie. *Keluar dari Krisis Multi Dimensi*. LESFI, Yogyakarta, 2001.
- Andre Bayu Ala. *Kemiskinan dan Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Gadjahmada Press, Yogyakarta, 1981.
- Andre Bayo Ala. *Kemiskinan dan Strategi memerangi Kemiskinan*. Liberti Yogyakarta. 1996.
- Arikunto, suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek edisi revisi V*, Rineka cipta, Jakarta, 2002.
- Budi Santoso, Purbayu. *Retribusi Pasar Sebagai Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pasar Kabupaten di Sleman)*. Prisma, Vol.4, 19-35, Jakarta, 2009.
- Chambers, Robert. *Pembangunan Desa (Mulai dari belakang)*. LP3ES, Jakarta, 1983.
- Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, Pedoman Umum Penyaluran RASKIN, 2012.
- Muhammad, Abdulkadir. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Citra Aditya, 2007.
- Sedarmayanti. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Setyosari, Punaji. *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Subarsono, AG. *Analisis Kebijakan Publik. Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*, Cetakan Keenam, Penerbit CV. Alfabeta, Bandung, 2004.
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan, Kompetensi dan Praktiknya*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009.
- Surachmad, Winarno. *Dasar dan Teknik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah*. Bandung : Tarsito, 1978.

Sutrisno R. *Pemberdayaan Masyarakat dan Upaya Pembebasan Kemiskinan*. Philosophy Press bekerja sama Fakultas filsafat UGM, Yogyakarta, 2001.

Teguh, Muhammad. *Metode Penelitian Ekonomi : Teori dan Aplikasi*. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Winarno, Budi. *Kebijakan Publik :Teori dan Proses*. PT Buku Kita. Jakarta, 2007.

Yashin, Sulcahn. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (KBI-Besar) serta Ejaan Yang Disempurnakan Dan Kosa Kata Baru*. Surabaya: Amanah, 1997.

Yossy, Herma Panjaya. *Evaluasi Pelaksanaan Program Raskin di Kota Semarang (Studi Kasus : di Kelurahan Pedurungan Kidul)*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis : Universitas Diponegoro. Semarang, 2011.

www.depsos.go.id, dibuka pada tanggal 24 Mei 2014, pukul 14.00 WIB.

www.bps.go.id, dibuka pada tanggal 25 Mei 2014, pukul 12.00 WIB.

